

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
GOTONG ROYONG (PDPGR) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAKAN MASYARAKAT
DI DESA DESALOKA TAHUN 2021**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh

ERWIN ERLANI
NIM. 218130035

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
EVALUASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
GOTONG ROYONG (PDPGR) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI DESA DESALOKA TAHUN 2021

Oleh :

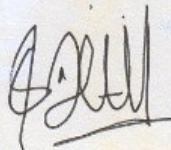
Erwin Erlani

Telah Memenuhi Syarat Dan Disetujui

Tanggal 1 Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si
NIDN. 0815118302

Pembimbing II



Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

EVALUASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN
GOTONG ROYONG (PDPGR) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAKAN MASYARAKAT
DI DESA DESALOKA TAHUN 2021

Disusun dan Diajukan oleh:


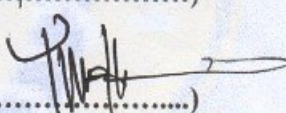
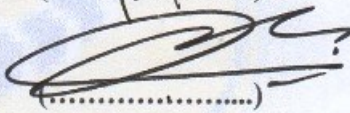
ERWIN ERLANI

NIM. 218130035

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan didepan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 1 Agustus 2022
Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

- | | | |
|--|------------|--|
| 1. <u>Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si</u>
NIDN. 0815118302 | Ketua | () |
| 2. <u>Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP</u>
NIDN. 0827118801 | Anggota I | () |
| 3. <u>Drs. Darmansyah, M.Si</u>
NIDN. 0008075914 | Anggota II | () |

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram


Dekan

Dr. H. Syarifuddin Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Erwin Erlani

Nim : 218130035

Dengan ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 1 Agustus 2022



ERWIN ERLANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Erlani
NIM : 218130035
Tempat/Tgl Lahir : Rampe, 26 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 082359856607
Email : erwinislam19@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan GSAKZ Rayong (PDPR)
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Desaloka
Tahun 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 12 September.....2022
Penulis



Erwin Erlani
NIM. 218130035

Mengotai
Kepala UPT Perustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Erlani
 NIM : 218130035
 Tempat/Tgl Lahir : Rempel, 26 Agustus 1999
 Program Studi : Umu Pemerintahan
 Fakultas : Umu Sosial dan Umu Politik
 No. Hp/Email : erlaniskom17@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gerakan Rostono (PPPER)
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dabelaka
Tahun 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 12 September.....2022
 Penulis



Erwin Erlani
 NIM. 218130035

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO:

“Pemuda Hari Ini Adalah Penentu Sepuluh Tahun Kedepan”

Persembahan:

- ❖ Untuk yang selalu memberikan segala hal yang tak akan ada habisnya sebagai penguasa alam semesta, tanpanya semua harapan ini akan menjadi sirna, tak ada kata lain yang mampu terucap selain kata syukur atas segala nikmat yang telah engkau berikan, terimah kasih ya ALLAH dan terimah kasih ya Rasulullah MUHAMMAD SAW.
- ❖ Kedua, Untuk orang tua saya yang telah memeberikan segalanya untuk anak saya, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, tak ada kata selain rasa bangga telah engkau lahirkan seorang anak yang sekiranya mampu untuk memberi sebuah kebanggaan pada kalian. Terimah kasih Bapak dan Ibu saya, yang telah berjuang diakhir masa perkuliahan saya untuk membiayai kuliyah saya, saya mencintai kalian.
- ❖ Bapak ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu kepada saya, teman-teman kelas Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, yang selalu ada dalam tawa dan duka. Tak ada kata lain yang mampu terucap ialah “Terimah Kasih”

KATA PENGANTAR

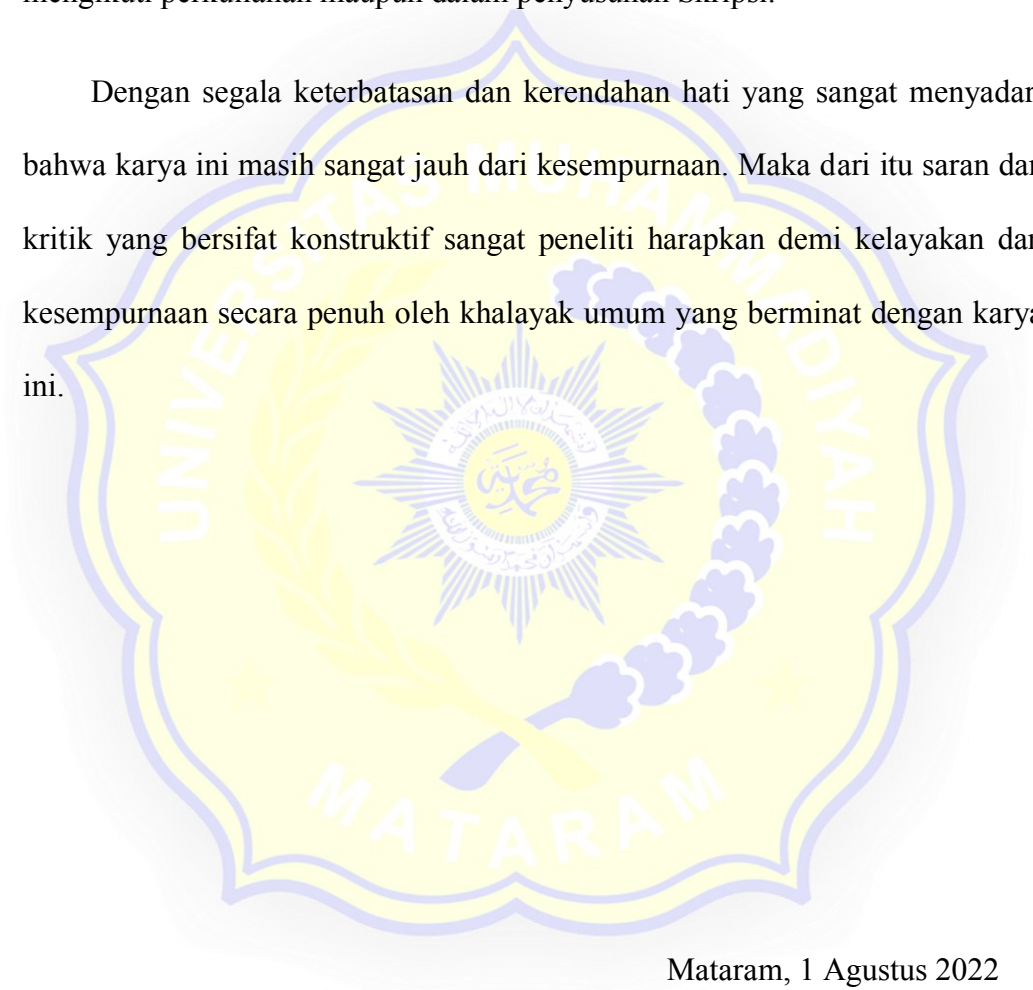
Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun skripsi yang berjudul "Kinerja Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021" dapat di selesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan Jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S. IP., M. IP Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
4. Ibu Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si Selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., MIP Selaku Dosen pembimbing II , terima kasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan pada khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan penulis skripsi ini.

7. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.



Mataram, 1 Agustus 2022

Penulis

ERWIN ERLANI

EVALUASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG
ROYONG (PDPGR) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DESA DESALOKA TAHUN 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desaloka dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desaloka. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sumber berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desaloka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dalam indikator kesesuaian program. Kesesuaian program yang dilakukan oleh PDPGR sudah sesuai sebagaimana yang disebutkan dalam Perda No 3 Tahun 2016 dan yang sudah dirancang, namun PDPGR peliuk nyer gading tidak bisa maksimal akibat sarana dan prasarana yang tidak dimilikinya. Meski dengan keterbatasan sarana dan prasaran Agen PDPGR tetap melakukan program sesuai target dan sasaran, meskipun banyak yang tidak sesuai, jumlah yang di usulkan dan yang terrealisasi. Tingkat ketercapaian program masih rendah, namun sudah bisa di kategorikan baik. Adapun Faktor yang mempengaruhi PDPGR yaitu 1) Kondisi, masyarakat yang berada di desa loka memiliki penduduk yang berada dalam garis kemiskinan. 2) Hambatan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap program PDPGR yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci : Evaluasi, Gotong Royong, PDPGR

**THE EVALUATION OF MUTUAL COOPERATION EMPOWERMENT
REGIONAL PROGRAM (PDPGR) IN INCREASING COMMUNITY
WELFARE IN LOKA VILLAGE IN 2021**

ABSTRACT

This study intends to evaluate the effectiveness of the Mutual Cooperation Regional Empowerment Program in enhancing community welfare in Desaloka Village and to ascertain the variables that affect the program's execution in enhancing community welfare in Desaloka Village.

It is a descriptive qualitative form of study. Observational methods, interviews, and documentation are used in data collection. Primary and secondary data are the sources of source data. The stages of data reduction, data presentation, and conclusion-drawing in the data analysis technique utilized descriptive qualitative techniques.

According to the study's findings, the Regional Mutual Assistance Empowerment Program's effectiveness in enhancing community welfare in Desaloka Village, Seteluk District, and West Sumbawa Regency is a sign of a program's applicability. Despite the fact that PDPGR's program is suitable and designed in line with Regional Regulation No. 3 of 2016, the lack of facilities and infrastructure prevents PDPGR from performing at its best.

PDPGR agents continue to carry out programs in accordance with targets and targets, even though many are not appropriate, the number of proposals, and those that are accomplished, despite having insufficient infrastructure and facilities. Even though the program's achievement level is still modest, it can still be considered good. PDPGR is impacted by 1) Conditions, as there are many people living in poverty in the nearby community. 2) Obstacles, such as a lack of community education on the PDPGR program run by local governments.

Keywords: PDPGR Mutual Cooperation Evaluation

**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	18
2.2.1 Definisi Evaluasi	18
2.2.2 Jenis-Jenis Evaluasi	20
2.2.3 Fungsi Evaluasi.....	21
2.2.4 Prinsip-Prinsip Evaluasi	25
2.2.5 Proses Evaluasi	27
2.3 Program.....	28
2.3.1 Definisi Program.....	28
2.3.2 Pelaksanaan Program	29
2.3.3 Tolak Ukur Program	29
2.4 Pemberdayaan	30
2.5 Gotong Royong.....	32
2.6 Kesejahteraan.....	34

2.7 Kerangka Berfikir	37
2.8 Definisi Konseptual.....	37
2.9 Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu	40
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4.1 Teknik Observasi (Pengamatan).....	42
3.4.2 Wawancara.....	42
3.4.3 Dokumentasi	42
3.5 Sumber Data.....	42
3.5.1 Data Primer	42
3.5.2 Data Skunder.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.6.1 Penyajian Data	44
3.6.2 Penarikan Kesimpulan	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Kondisi Geografis	46
4.1.2 Kondisi Keadaan Penduduk.....	46
4.1.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Usia.....	47
4.1.4 Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa.....	48
4.2 PDPGR Kecamatan Seteluk.....	50
4.3 Program PDPGR.....	52
4.4 Anggaran Biaya PDPGR.....	54
4.5 Struktur PDPGR	55
4.6 Hasil Penelitian	56
4.6.1 Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Di Desa Desaloka Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	56
4.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .	69

4.7 Pembahasan	75
4.7.1 Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	75
4.7.2 Faktor Yang Mempengaruhi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Desaloka	82

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	87
5.1 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Desentralisasi adalah bentuk dari wujud otonomi daerah yang pada dasarnya merupakan upaya memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola potensi dan keanekaragaman daerah secara efektif dan efisien. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sebagai produk administrasi negara kecenderungannya semakin meningkat secara kuantitatif sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam negara kesejahteraan. Problematika yang mungkin timbul sehubungan dengan semakin meningkatnya kuantitas peraturan perundang-undangan produk pemerintah adalah adanya perbedaan besar dan kurangnya koordinasi dari peraturan

perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan Pembangunan Nasional serta Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Akan tetapi pada zaman sekarang ini sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan, maka perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosialnya. Meninjau dari kebijakan dan program masa lalu cenderung dilaksanakan secara kurang efektif yang dimana jangkauan pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan institusi/panti sosial dan dilaksanakan tanpa rencana strategi nasional.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha kesejahteraan sosial, maupun Lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009) tentang kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat pada era globalisasi ini tentunya memberikan tantangan yang besar kepada pemerintah, dimulai dengan melihatnya kondisi ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan kultural yang tampak sangat nyata, adanya degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Dengan tantangan ini tentunya akan memacu pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau program yang dapat tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan ini tidak dapat di capai dalam waktu sekejap, melainkan melalui sebuah proses yang tidak singkat (Suharto, 2018:14).

Budaya gotong royong adalah cerminan perilaku yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Bilamana dilakukan kajian di seluruh wilayah Indonesia, maka akan ditemukan praktek gotong royong tersebut dengan berbagai macam istilah dan bentuknya, baik sebagai nilai maupun sebagai perilaku. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, sebagaimana pengertian yang dikemukakan sebelumnya, namun juga berperansebaga nilai-nilai moral. Artinya gotong royong selalu menjadi acuan perilaku, pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbagai macam wujudnya.

Program Pemberdayaan Gotong Royong merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan selama ini hanya berdampak kecil, sehingga tujuan pembangunan nasional yang terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan selama ini menimbulkan masalah yang besar (Dedi, 2014: 29).

Secara konseptual gotong royong dapat diartikan sebagai model kerjasama yang disepakati bersama. Menurut Koentjaraningrat (dalam Rochmadi, 2016:4), ada dua jenis gotong royong yang dikenal masyarakat Indonesia. Saling membantu, gotong royong, gotong royong. Kegiatan bertani, kegiatan pekerjaan rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan hajatan, dan kegiatan gotong royong yang mendukung bencana dan duka cita. Amal, di sisi lain, biasanya dilakukan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan umum. Ini membedakan antara Gotong Royale yang diprakarsai warga dan kerja sama yang dipaksakan.

Konsep gotong royong juga dapat diartikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat (Pranadji dalam Rochmadi, 2016:4). Hal ini karena dapat menjadi modal sosial bagi bangsa dan bangsa Indonesia untuk membangun kekuatan kelembagaan untuk membentuk suatu bangsa di tingkat masyarakat, masyarakat nasional dan masyarakat. dalam mencapai kemakmuran. Hal ini juga karena di dalam Gotong Royong terkandung pentingnya aksi kolektif untuk perjuangan, otonomi, tujuan bersama dan kedaulatan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemebrdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah proses perbaikan pola pikir (kognitive), sikap mental (afective) dan pola tindak (psicomotoric) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan.

Sedangkan pengertian Program Pemberdayaan Gotong Royong atau yang disingkat dengan PDPGR dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, program daerah pemberdayaan gotong royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Adapun fungsi agen PDPGR menurut UU Nomor 3 Tahun 2016 yaitu sebagai motor penggerak gotong royong. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu program jambanisasi, jamban diberikan langsung pada masyarakat yang belum memiliki jamban, mengingat Negara bertanggung jawab agar terpenuhi hak hidup sehat bagi warga negaranya untuk semua lapisan (dalam Ketetapan Konstitusi WHO dan UUD 45 pasal 28) tentang hak asasi manusia.

Sehingga perlu di kaji lebih dalam bagaimana pola pemilihan dari kelompok sasaran dalam PDPGR ini serta kriteria yang jelas sebagai persyaratan penerimaan bantuan dari PDPGR ini sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat serta ketidakpercayaan masyarakat kepada agen PDPGR dan program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di

Kabupaten Sumbawa Barat (sumbawabarat.go.id diakses tanggal 17 November 2021 jam 12:21WITA).

Berikut adalah capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa Barat :

Tabel 1.1

Tahun	2016	2017	2018	2019
Target				
Periode (Tahun 2021)	100	100	100	100
Target	100	100	100	100
Ralisasi	100	100	100	100
Capaian Kerja	100	100	100	100
Persentase Capaian Kinerja Sampai Ahir Periode	100	100	100	100
Standar Nasional				

(Jika Ada)				
------------	--	--	--	--

Sumber: Bappeda & Litbang KSB 2019, DPMD KSB 2019, dan Analisis Data 2020.

Berangkat dari pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Desaloka Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Desa Desaloka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desaloka?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Desaloka
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Desaloka.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan system informasi.
3. Bagi peneliti dapat menamba wawasan wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
4. Bagi peneliti lain dapat menjadika sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

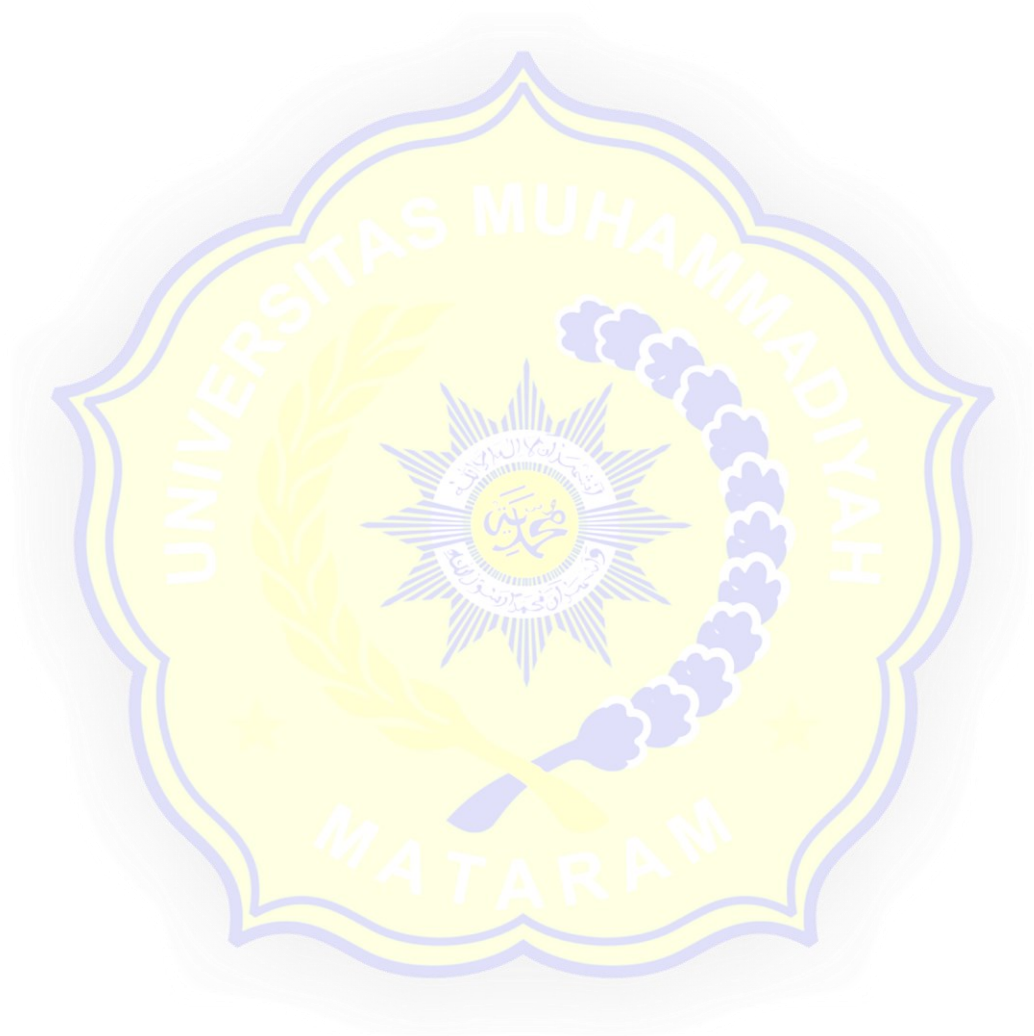
1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten Sumbawa barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Desa Desaloka.

1.4.3 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumber data atau informasi untuk peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian Program Daerah Pemberdayaan Gotong Rorong.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Diharapkan mampu menambah wawasan bagi peneliti dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terhadulu

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam melakukan penelitiannya dan memperkaya teori-teori yang digunakan untuk memvalidasi penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan makalah penelitian ini, penulis mengkaji dan mengumpulkan informasi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan yang ada. Selain itu, kami memeriksa informasi tidak hanya dari makalah dan esai tetapi juga dari buku-buku untuk mendapatkan teori judul yang menjadi dasar teori ilmiah. Temuan dari studi sebelumnya meliputi:

Pertama, sebuah proyek berjudul 'Efektivitas Keberlanjutan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong (PDPGR) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumbawa Barat (Studi Kasus Desa Seroto, Kabupaten Taliwan, Provinsi Barat)' yang dilakukan oleh Citra Dwi Kurban (2021). . .Sumbawa). Dari hasil penelitian ini, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: jangkauan. Selain itu, beberapa aspek program PDPGR dinilai kurang efektif. B. Dalam menentukan tujuan program dan ketepatan sosialisasi program. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan Program Daerah Penguatan Gotong Royong untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama Desa Seroth (PDPGR) adalah peran fasilitator, pelibatan masyarakat dan keterampilan kelompok sasaran merupakan variabel.

Namun karena rendahnya keterampilan dan kualitas petugas pemberdayaan di Desa Seroto serta pemahaman masyarakat (kelompok sasaran) terhadap pemantauan program PDPGR, pelaksanaannya belum optimal. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iyut Indrajaya. (2021). Berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kerjasama Daerah (PDPGR) (2021 Studi Kasus Kabupaten Blane, Provinsi Sumbawa Barat)”. Rendahnya agen pemberdayaan desa dan inilah yang menjadi pendorong pelibatan masyarakat dalam Program Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elsa Elya Safitri. (2021). dengan judul “Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program daerah pemberdayaan Gotong Royong (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat) “. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 sudah baik, namun masih banyak menemukan keluhan dari masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaannya, serta kurang optimalnya sistem pendataannya. Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian empiris.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Lestanata, Ilham Zitri, Susiana Susiana. (2020). dengan judul “Strategi Pemeintah Dalam Pelaksanan Program daerah pemberdayaan Gotong Royong Di Desa Kelanir Kecamatan

Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017“.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Strategi PDPGR di Desa Kelanir mampu membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR, namun dalam pelaksanaanya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. PDPGR di Desa Kelanir tidak berjalan optimal dikarenakan tidak adanya sosialisasi program kepada masyarakat, rendahnya kaulitas agen Pemberdayaan PDPGR Desa Kelanir sebagai ujung tombak keberhasilan program serta tidak adanya Structure Operational Procedure (SOP) sejak tahun 2016 yang dijadikan pedoman pelaksanaan program.. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad saleh (2020) dengan judul “PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) sebagai Inovasi dalam Penanganan Percepatan Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat“.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PDPGR sebagai penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa antara lain; 1) Mempermudah dan mempercepat pembentukan pokmas yang merupakan aturan dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 2) Membantu proses pendataan masyarakat terdampak gempa secara cepat dan meyeluruh. Hal ini disebabkan adanya agen PDPGR yang terstruktur dan massif sampai tingkat blok yang tergabung dalam Pokmas Plus. 3) Membantu mempercepat proses admistrasi seperti pembuatan RAB, pencairan dana, pengurusan ke BPBD, dan pembuatan LPJ. Hal ini disebabkan agen

PDPGR memiliki pengalaman terkait dengan program rehab rumah selama 2 tahun terakhir. 4) Memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa peraturan dan kebijakan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat terkait PDPGR. Informan dipilih dengan purposive sampling. Informan yang dipilih berjumlah 7 orang yang merupakan tim pengarah tingkat kabupaten, agen PDPGR, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Citra Dwi Kurbani. (2021)
	Judul	Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Barat (Studi Kasus Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)
	Metode Penelitian	Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif.
	Hasil Penelitian	hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) khususnya di Desa Seloto telah memberikan

		<p>pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, walaupun tidak dalam skala besar. Dan dalam beberapa aspek program PDPGR dinilai masih kurang efektif seperti dalam menentukan Ketepatan sasaran program dan Sosialisasi program.</p>
	Relevansi	<p>Peneliti pertama meneliti tentang Efektivitas keberlangsungan Program daerah pemberdayaan gotong royong sedangkan peneliti kedua lebih kepada mengevaluasi keberlangsungan program tersebut</p>
	Criticalpoint	<p>Pada bagian Bab II nya penjelasan atau dari berbagai teori atau konsep terlalu banyak disertakan sehingga tidak menutup kemungkinan dapat membingungkan pembaca. Artinya penjelasan dari berbagai konsep atau teori tersebut cukup dicantumkan 3-5 poin saja.</p>
2	Nama Peneliti	<p>Iyut Indrajaya. (2021).</p>
	Judul	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) (Study Kasus Di Kecamatan Brang Ene kabupaten Sumbawa barat Tahun 2021)</p>
	Hasil Penelitian	<p>hasil penelitian bahwa secara umum program PDPGR di Kecamatan Brang Ene memberikan</p>

		perubahan terhadap masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat masih minim serta rendahnya kualitas Agen Pemberdayaan Desa yang menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian empiris.
	Relevansi	Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang di implentasikan di Kabupaten Sumbawa Barat
	Criticalpoint	Definisi untuk berbagai teori seharusnya tidak dijelaskan terlalu panjang, cukup poin intinya saja.
3	Nama Peneliti	Elsa Elya Safitri. (2021)
	Judul	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program daerah pemberdayaan Gotong Royong (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat)
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, pengawasan dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 sudah baik, namun masih banyak menemukan keluhan dari masyarakat yang tidak puas terhadap

		pelaksanaannya, serta kurang optimalnya sistem pendataannya.
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian empiris.
	Relevansi	Sama-sama mengkaji tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Namun perbedaannya adalah dimana peneliti terdahulu mengkaji tentang pengawasan peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 sedangkan peneliti selanjutnya mengkaji tentang evaluasi dari PDPGR
	Criticalpoint	Penjelasannya masih kurang terlalu mudah untuk dipahami diakarenkan masih terlalu sedikit pemaparan materi.
4	Nama Peneliti	Yudhi Lestanata, Ilham Zitri, Susiana Susiana. (2020)
	Judul	Strategi Pemeintah Dalam Pelaksanaan Program daerah pemberdayaan Gotong Royong Di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Strategi PDPGR di Desa Kelanir mampu membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian

		masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR, namun dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
	Metode Penelitian	Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
	Relevansi	Relevansi dalam penelitian ini yaitu Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong
	Criticalpoint	Penjelasannya sudah sangat bagus dan baik dan mampu membuat pembaca mudah untuk memahami hasil penelitiannya.
5	Nama Peneliti	Muhammad saleh (2020)
	Judul	PDPGR (Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong) sebagai Inovasi dalam Penanganan Percepatan Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PDPGR sebagai penanganan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa mempermudah dan mempercepat pembentukan pokmas yang merupakan aturan dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Relevansi	Relevansi penelitian ini yaitu Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong
Criticalpoint	Judul penelitiannya sangat baik serta hasil penelitiannya sudah di jelaskan dengan baik juga sehingga mampu membuat pembaca dengan mudah untuk memahaminya. Namun untuk penjelasannya jangan terlalu panjang cukup poin pentingnya saja dijelaskan dengan ringkas

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Definisi Evaluasi

Secara umum menurut Anas Sudijono dalam (Dwi Gusman Saputra, 2011:16), evaluasi berarti kegiatan atau proses mengukur dan mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Saat Anda mencapai tujuan Anda secara bertahap, evaluasi berkelanjutan membantu Anda memahami tahapan mana yang telah diselesaikan, mana yang sesuai rencana, dan mana yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Menurut William N. Dunn (Dwi Gusman Saputra, 2011:16), istilah evaluasi identik dengan evaluasi, evaluasi, evaluasi. Evaluasi adalah kumpulan informasi tentang nilai dan kegunaan hasil kebijakan. Dalam kebijakan, evaluasi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik. Beberapa definisi diagramatik evaluasi kebijakan publik, di antaranya Mustopadijaja (Widodo, 2007:111), memberikan pengertian evaluasi kebijakan publik sebagai berikut: Tujuan kebijakan, tujuan kelompok yang terkena dampak (kelompok sasaran), berbagai instrumen kebijakan yang

digunakan, reaksi dari lingkungan kebijakan, hasil yang dicapai, dampak yang direalisasikan, dll.

Menurut Yusuf (dalam Aspul Wadi, 2016:10), evaluasi adalah upaya untuk mengukur dan mengidentifikasi nilai secara objektif dari pencapaian hasil yang direncanakan sebelumnya, dan hasil evaluasi memberikan umpan balik untuk perencanaan masa depan (Yusuf, 2000:3 Dalam hal ini). Dalam hal ini Yunus memfokuskan kajian evaluasi yang berkaitan dengan manajemen, dimana evaluasi merupakan salah satu fungsi atau unsur manajemen yang tugasnya selain untuk meningkatkan fungsi administratif atau sosial yaitu perencanaan.

Selain itu, menurut Jones (dalam Aspul Wadi, 2016:10), evaluasi adalah kegiatan yang dirancang untuk menimbang utilitas program terhadap spesifikasi 24 kriteria, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi. Jones kemudian dikutip dari Weiis (dalam Aspul Wadi, 2016:10). Kami menjelaskan bahwa evaluasi adalah sebuah kata, 24 kriteria yang mencakup segala macam pertimbangan, tetapi menggunakan kata dalam pengertian umum adalah istilah untuk menimbang kebaikan. Orang menyelidiki atau mengamati fenomena menggunakan skala eksplisit dan 24 kriteria

Menurut Suharto, dikutip Boyle (dalam Aspul Wadi, 2016:10), evaluasi dilakukan untuk memastikan pengetahuan tentang capaian, kemajuan dan hambatan dalam mengimplementasikan rencana strategis. Perbaikan masa depan. Dalam studinya tentang layanan sosial. Komponen sosial utama dari evaluasi berfokus pada hasil, hasil dan dampak dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, implementasi harus disertai dengan transparansi dan keterverifkasian,

dan dengan kesiapan untuk kinerja sosial dari implementasi rencana tersebut. Ini mencakup setidaknya:

- a. Sosial masukan
- b. Sosial keluaran
- c. Sosial hasil

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan sebagai berikut.

- a. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
- b. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar social

Dalam konteks ini dapat diartikan, sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan social, penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan 24 kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

2.2.2. Jenis-jenis Evaluasi

Menurut Suharto (dalam Aspul Wadi, 2016:11) Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu;

a. Evaluasi pada tahap perencanaan

Ini adalah penilaian yang digunakan selama fase perencanaan untuk mencoba dan memilih dan menetapkan skala prioritas untuk berbagai opsi dan cara di mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai.

b. Evaluasi pada tahap implementasi

Evaluasi pada fase ini merupakan kegiatan melakukan analisis untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Ada perbedaan antara konsep survei dan pemantauan ini. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apa yang telah dicapai dan apakah program dirancang untuk memenuhi tujuan tersebut. Tujuan pemantauan adalah untuk memeriksa apakah pelaksanaan proyek sejalan dengan rencana dan apakah rencana tersebut sesuai untuk mencapai tujuannya.. Periksa untuk melihat apakah itu menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan.

c. Evaluasi setelah pengenalan

Dalam hal ini, konsep ada pada tahap implementasi, perbedaannya adalah apa yang dievaluasi dan apa yang dianalisis, kemajuan implementasi dibandingkan dengan rencana, tetapi hasil implementasi dibandingkan dengan rencana. Dengan kata lain, apakah efek yang diperoleh dengan melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai..

2.2.3. Fungsi Evaluasi

Menurut Wahab (dalam Aspul Wadi, 2016:13) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan bias dilihat sebagai berikut ;

- a. Penilaian memberikan informasi yang tidak tepat dan dapat diandalkan tentang kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang dipenuhi oleh tindakan publik. Dalam hal ini, peringkat menunjukkan seberapa baik tujuan dan sasaran tertentu telah dicapai.
- b. Evaluasi membantu memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan dan sasaran. Dengan menetapkan tujuan dan sasaran dan mengoperasikannya, nilai menjadi jelas.
- c. Evaluasi ini berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang kebijakan yang berkinerja buruk untuk membantu meringkaskan ulang agenda kebijakan.

Fungsi evaluasi sangat luas, tergantung bagaimana kita memahami dan mengamatinya. Pemahaman yang lebih baik tentang fungsi evaluasi biasanya mengarah pada kesadaran yang lebih besar tentang bagaimana evaluasi program dilakukan, diikuti dengan kesadaran yang lebih besar tentang bagaimana evaluasi program dilakukan. (Suranto Aw, 2019:95) mengikuti beberapa fungsi evaluasi setelah :

- A. Evaluasi yang berguna adalah mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan program. Tentu saja, manajer yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program selalu ingin tahu seberapa baik kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuannya. Untuk itu, mereka mencoba menggali informasi. Informasi ini memberikan indikasi seberapa sukses program tersebut dan seberapa baik manajer memenuhi tanggung jawab mereka. Dengan menggunakan informasi ini, manajer dapat membuat keputusan

tentang keberlanjutan program mereka. Tanpa evaluasi, manajemen tidak memiliki cara untuk mengetahui keberhasilan program.

- B. Manajemen, Evaluasi berfungsi sebagai catatan manajemen yang dapat digunakan sebagai laporan kinerja suatu program atau kegiatan. Pelaksanaan program harus didukung dengan bukti pengendalian yang cukup berupa berita acara, laporan kegiatan, dan laporan keuangan. Sertifikasi administratif memang merepotkan dan memberatkan manajemen, namun sangat penting sebagai penunjang pembuatan laporan pertanggungjawaban. Bukti administratif diberikan dengan evaluasi dan putaran berikutnya dapat disajikan sebagai dukungan hukum untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program.
- C. Rekomendasi, review merupakan dasar dari rekomendasi. Pelaksanaan program harus dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan tujuannya. Setelah selesai, Anda dapat membuat rekomendasi kepada pemangku kepentingan. Misalnya, sangat strategis untuk merekomendasikannya kepada manajemen sebagai acuan pengambilan keputusan. Rekomendasi kepada pemangku kepentingan akan dipertimbangkan untuk memperkuat peran mereka dalam pelaksanaan program.
- D. Koreksi dan evaluasi berfungsi untuk membantu manajemen dalam mengoreksi berbagai kekurangan pelaksanaan program. Bahkan jika suatu program direncanakan dengan matang, seringkali menemui berbagai kendala dan kelemahan dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, modifikasi harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan kondisi lapangan. Evaluasi adalah kunci untuk bisa

memperbaikinya. Informasi yang diperoleh dari evaluasi dipertimbangkan untuk koreksi objektif.

E. Evaluasi Formatif Evaluasi formatif berarti bahwa hasil evaluasi digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki berbagai kekurangan di sepanjang program. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak harus menunggu sampai pelaksanaan program selesai.

F. Total, Rating memiliki fungsi total. Artinya, hasil evaluasi menggambarkan pernyataan tentang program secara keseluruhan. Fungsi ini hanya dapat dijalankan ketika implementasi program dinyatakan selesai.

Berdasarkan fungsi evaluasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa nilai evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Keberhasilan program itu sendiri dapat diukur dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Menurut Dunn yang dikutip oleh Suharto (Dalam Aspul Wadi, 2016:14), beberapa istilah evaluasi memiliki kemiripan dan masih erat hubungannya atau masih terlibat dalam evaluasi itu sendiri.;

- a. Pengukuran, pengukuran sebagai suatu proses kegiatan yang menentukan luas atau kuantitas untuk memperoleh informasi atau data berupa evaluasi tentang kinerja yang dicapai selama periode waktu tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur terkait yang ditetapkan.
- b. Tes secara harfiah berarti alat ukur yang berupa rangkaian soal atau latihan yang mengukur kompetensi, perilaku, dan potensi sebagai hasil belajar.

- c. Proses pengumpulan atau pemrosesan data dalam format yang evaluatif dan dapat dijelaskan.

2.2.4. Prinsip-prinsip Evaluasi

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang pelaksanaan program. Menurut (Suranto Aw, 2019:93), untuk mendapatkan hasil evaluasi, kita harus berangkat dari prinsip-prinsip evaluasi umum sebagai berikut:

1. Evaluasi yang berkelanjutan dan tepat artinya apa yang dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lengkap harus dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan. Melakukan evaluasi selama program harus memperhitungkan data akun yang terkait dengan program masa lalu. Kami berharap evaluasi dapat dilakukan dengan lancar meskipun dengan kepentingan yang berbeda. Dengan prinsip kerja seperti itu, hasil evaluasi terkadang dapat menjelaskan tingkat keberhasilan suatu program.
2. Objektivitas, evaluasi harus objektif. Artinya, memastikan sikap “sebagaimana adanya” dalam konteks program. Oleh karena itu, sikap objektif evaluator harus dijauhkan dari kepentingan tertentu. Prinsip objektif evaluasi dicirikan oleh kewajiban untuk mendasarkan kesimpulan dan rekomendasi pada kenyataan (data dan fakta) yang sebenarnya terjadi di lapangan daripada pada interpretasi, manipulasi, dan teknik subjektif. Oleh karena itu, evaluator harus melepaskan perasaan dan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi atau menurunkan makna informasi.
3. Evaluasi partisipatif melibatkan banyak pihak sebagai responden atau sumber data, termasuk pihak yang dapat menyumbangkan data dalam proses evaluasi

untuk memastikan kelengkapan data dari sumber yang dapat dipercaya. Keterlibatan mereka dalam proses evaluasi juga bermanfaat selama fase perbaikan program, karena mendukung perbaikan program sesuai dengan pendapat dan saran mereka.

4. Komprehensif: Ketika mengevaluasi suatu program, evaluator harus melihat aspek-aspek program secara keseluruhan. Jangan hanya melihat produknya, jelaskan mengapa produknya seperti itu, apa inputnya, dan seperti apa prosesnya.
5. Kemudahan evaluasi yang praktis. Oleh karena itu, penilai harus merancang alat penilaian yang mudah diterapkan dan diterapkan dalam praktik, baik dari sudut pandang penilai maupun responden. Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai kondisi lapangan.
6. Memang objek yang akan dievaluasi harus diidentifikasi dengan jelas. Jumlah sumber informasi harus cukup dan harus menunjukkan pengetahuan yang baik tentang program yang dievaluasi. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan kenyataan. Alat evaluasi harus menunjukkan keakuratan/keandalan pengukurannya (reliabilitas) dan benar-benar mengukur apa yang diukurnya (validitas). Kinerja suatu program tidak lepas dari konteks penempatannya, sehingga informasi kontekstual harus digunakan dalam menginterpretasikan hasil evaluasi.
7. Prinsip ekonomi harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi tanpa mengurangi tujuan ekonomis dan memperoleh informasi yang benar sebagai imbalan perbaikan program. Dalam arti tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan. Oleh karena itu, proses evaluasi harus dirancang dengan

cermat untuk mengantisipasi kemungkinan penggunaan dana yang berbeda pada setiap tahap..

2.2.5. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dengan perencanaan. Oleh karena itu, proses pelaksanaan evaluasi harus didasarkan pada rencana evaluasi program. Namun dalam praktiknya tidak jarang ditemukan evaluasi program yang justru meningkatkan ketidakpastian fungsi evaluasi, institusi, orang yang seharusnya melakukan evaluasi, dan biaya evaluasi.

Ada beberapa prinsip birokrasi yang harus diperhatikan oleh para pihak terkait erat dengan tugas evaluasi ketika melakukan proses evaluasi.:

- a. Tugas atau tanggung jawab, maka klien atau penerima tugas harus diperjelas.
- b. Definisi dan implikasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah bahwa menemukan bug harus dihindari.
- c. Definisi evaluasi adalah membandingkan rencana pelaksanaan dengan memanipulasi ukuran kuantitatif keseluruhan program, sehingga ukuran kualitatif dan kuantitatif dari arti keberhasilan diartikulasikan dalam rencana program meningkat.
- d. Artinya, tim yang melakukan penilaian adalah tim yang menasehati atau menasihati instruktur, dan saran atau penggunaan saran, dan pengambil keputusan berdasarkan saran atau saran, berada di tangan pemimpin program.
- e. Keputusan yang dibuat berdasarkan data atau pengetahuan teknis harus disarankan secermat mungkin, karena ada banyak hal yang dipertaruhkan terkait program yang akan mempengaruhi masa depan proyek. .

- f. Hubungan dengan proses harus didasarkan pada suasana yang konstruktif dan objektif, menghindari analisis subjektif. Dengan demikian, evaluasi dapat didefinisikan sebagai salah satu program terpenting dalam siklus pengelolaan program..

2.3. Program

2.3.1 Definisi Program

Program adalah sarana untuk mencapai tujuan. Semua bentuk perencanaan lebih terorganisir dan lebih mudah digunakan dengan program ini. Hal ini mudah dipahami karena program itu sendiri berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program.

Program merupakan elemen kunci yang perlu disiapkan untuk melaksanakan kegiatan implementasi, karena mencakup berbagai aspek seperti:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kebijakan–kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu.
- c. Adanya aturan–aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Faktor kedua yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan program adalah adanya sekelompok orang yang akan menguji tujuan program. Hal ini akan membuat kelompok masyarakat ini merasa terlibat dan membawa hasil program pada implementasi dan perubahan. Peningkatan membawa hidup Anda. Suatu program tidak dilaksanakan jika tidak menguntungkan sekelompok orang

2.3.2. Pelaksanaan Program

Untuk memahami pentingnya implementasi, Wahab (dalam Aspul Wadi, 2016:20) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan, merumuskan konsep.

Berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan tergantung pada unsur-unsur pelaksanaannya. Elemen implementasi adalah elemen ketiga. Implementasi menjadi penting karena pelaksana program, baik organisasi maupun individu, bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan pada tataran praktis dan operasional. Menurut Edward (2003:32), ia mengembangkan model yang didahului oleh dua masalah:

1. Kondisi – kondisi awal apakah yang diperlukan untuk menyukseskan implementasi kebijakan.
2. Hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan kebijakan.

2.3.3. Tolak Ukur Evaluasi Program

Menurut Swito (2022: 16) Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang bias dijadikan penilaian terhadap program yang telah berlangsung, berhasilnya atau tidak berhasilnya suatu program berdasarkan tujuan yang sudah tentu memiliki tolak ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi suatu program adalah ;

- a. Kesesuaian Program
- b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
- c. Jumlah sasaran yang dijangkau
- d. Tingkat Keberhasilan Program

2.4. Pemberdayaan

Empowerment berasal dari bahasa Inggris yang berarti pemberdayaan. Dalam arti memberi atau menambah “kekuatan” (power) kepada yang lemah atau yang kurang beruntung. Menurut Sedarmayanti (2013:286), istilah 'pemberdayaan' secara harfiah dapat diartikan sebagai lebih berdaya dari sebelumnya, baik dari segi kewenangan, tanggung jawab maupun kapasitas pribadi. Empowerment adalah transformasi filosofi bisnis yang membantu menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat menggunakan keterampilan dan energi mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mendorong inisiatif dan reaksi dengan pemberdayaan, dan untuk memungkinkan penyelesaian masalah yang muncul secara cepat dan fleksibel (Sedarmayanti, 2013: 81). Menurut Edi Suharto dalam (Sabri, 2021:38) secara konseptual pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata power (kekuasaan atau pemberdayaan). Hal ini karena gagasan utama pemberdayaan menyangkut kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan, terlepas dari keinginan dan kepentingan mereka. Ini adalah proses pembangunan yang mempromosikan martabat dan kesejahteraan. Oleh karena itu, profesi mulia sebagai agen harus memperkuat masyarakat di era global saat ini.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu keadaan dimana pemerintah atau organisasi mengubah atau memperbaharui

masyarakat yang rentan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan hidup secara layak sesuai dengan kemanusiaannya. Baik.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (dalam Heri Kurniawan, 2018:9) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya local, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan dan kreatifitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada pengertian teori para ahli diatas, dalam penelitian ini pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat dapat mencapai kemandirian. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberi dorongan, peluang, kesempatan dan perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktivitas.

Selanjutnya menurut Tjokowinoto (dalam Heri Kurniawan, 2018:10), tujuan pemberdayaan dirumuskan dalam tiga bidang: ekonomi, politik dan sosial budaya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat guna membebaskan masyarakat dari penguasaan kekuasaan, termasuk bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Konsep pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menciptakan ekonomi yang kuat, besar, mandiri dan berdaya saing dalam mekanisme pasar yang besar dimana kelompok ekonomi yang lebih lemah diberdayakan. Pemberdayaan dalam ranah politik merupakan upaya untuk memperkuat rakyat kecil, terutama dalam proses pengambilan keputusan mengenai negara, kehidupan bernegara, atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam ranah sosial budaya adalah upaya pemberdayaan masyarakat kecil dengan mengangkat, memperkuat, dan menegakkan nilai, gagasan, dan norma untuk memfasilitasi terwujudnya organisasi sosial yang mampu melakukan kontrol politik dan ekonomi. Jauh dari akhlak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, ketimpangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan tercermin dalam indikator Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang Tidak Memadai/Tidak Memadai. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan transportasi. keterbelakangan, seperti produktivitas rendah, kurangnya bakat, dan kapasitas pengambilan keputusan yang terbatas.

2.5 Gotong Royong

Secara konseptual gotong royong dapat diartikan sebagai model kerjasama yang disepakati bersama. Menurut Koentjaraningrat (dalam Rochmadi, 2016:4), ada dua jenis gotong royong yang dikenal masyarakat

Indonesia. Saling membantu, gotong royong, gotong royong. Kegiatan bertani, kegiatan pekerjaan rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan hajatan, dan kegiatan gotong royong yang mendukung bencana dan duka cita.

Amal, di sisi lain, biasanya dilakukan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan umum. Ini membedakan antara Gotong Royale yang diprakarsai warga dan kerja sama yang dipaksakan. Konsep gotong royong juga dapat diartikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat (Pranadji dalam Rochmadi, 2016:4). Hal ini karena dapat menjadi modal sosial bagi bangsa dan bangsa Indonesia untuk membangun kekuatan kelembagaan untuk membentuk suatu bangsa di tingkat masyarakat, masyarakat nasional dan masyarakat. dalam mencapai kemakmuran. Hal ini juga karena di dalam Gotong Royong terkandung pentingnya aksi kolektif untuk perjuangan, otonomi, tujuan bersama, dan kedaulatan.

Dari segi sosial budaya, nilai gotong royong diartikan sebagai tindakan individu atau dilakukan tanpa pamrih (mengharapkan balasan) untuk bersama-sama melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama atau untuk tujuan tertentu. tindakan. Pria. Misalnya, petani gotong royong membersihkan saluran irigasi yang menuju ke sawah mereka, dan masyarakat gotong royong membangun rumah bagi warga yang terkena dampak puting beliung. Sepanjang sejarah perkembangan masyarakat, usahatani mulai dari budidaya hingga panen dilakukan secara bergantian oleh masing-masing pemilik padi, dan dilakukan secara gotong royong.

Budaya gotong royong mencerminkan perilaku yang telah lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Ketika penelitian dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, kami menemukan bahwa praktik gotong royong dipraktikkan dalam berbagai istilah dan bentuk baik nilai maupun perilaku. Bagi orang Indonesia, gotong royong tidak hanya berarti tindakan seperti yang disebutkan di atas, tetapi juga berfungsi sebagai nilai moral. Artinya, berbagai bentuk gotong royong telah menjadi acuan perilaku dan sikap masyarakat Indonesia terhadap kehidupan.

Sebagaimana diketahui, setiap tindakan manusia selalu mengacu pada nilai-nilai moral yang menjadi acuan hidupnya, pandangan hidupnya. Misalnya, orang mandi sepanjang waktu karena menyinggung nilai kebersihan. Oleh karena itu, ketika seseorang mengatakan tidak apa-apa untuk tidak mandi, itu berarti pasien belum mengubah nilai kebersihan menjadi gaya hidup.

2.6. Kesejahteraan

Menurut (Adi Fahrudin, 2012), kata sejahtera mencakup kata sansekerta *catera*, yang berarti payung. Dalam konteks perawatan, "Catera" adalah orang kaya, orang yang bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya, menjalani kehidupan yang aman dan damai secara fisik dan mental.

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai (Harry Hikmat, dalam Almizan, 2016: 72). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berhasil harus dicapai tidak hanya pada sisi material, tetapi juga pada sisi spiritual. Kebaikan bersama yang diinginkan tentu tidak akan tercapai jika proses pembangunan ditujukan semata-mata pada keberhasilan

materi. Terlepas dari ketersediaan semua fasilitas, orang akan menemukan hidup kosong dan tidak berarti.

Beberapa orang selalu mengaitkan kebahagiaan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran kondisi hidup yang baik. Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu tentang kehidupan di masyarakat, dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada, dalam hal tujuan, harapan dan standar serta kekhawatiran tentang kehidupan. Konsep ini memiliki arti yang lebih luas, karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologi, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial dengan lingkungan. UU No. 13 Tahun 1998 juga menjelaskan pentingnya bantuan sosial. Kesejahteraan adalah rasa aman, kesopanan, kedamaian internal dan eksternal yang memungkinkan semua warga negara untuk melakukan yang terbaik untuk diri mereka sendiri, keluarga dan masyarakat, dari kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang didefinisikan sebagai kehidupan material dan spiritual dan sistem sosial yang dijiwai dengan rasa Dengan memperhatikan hak dan kewajiban manusia berdasarkan Pancasila.

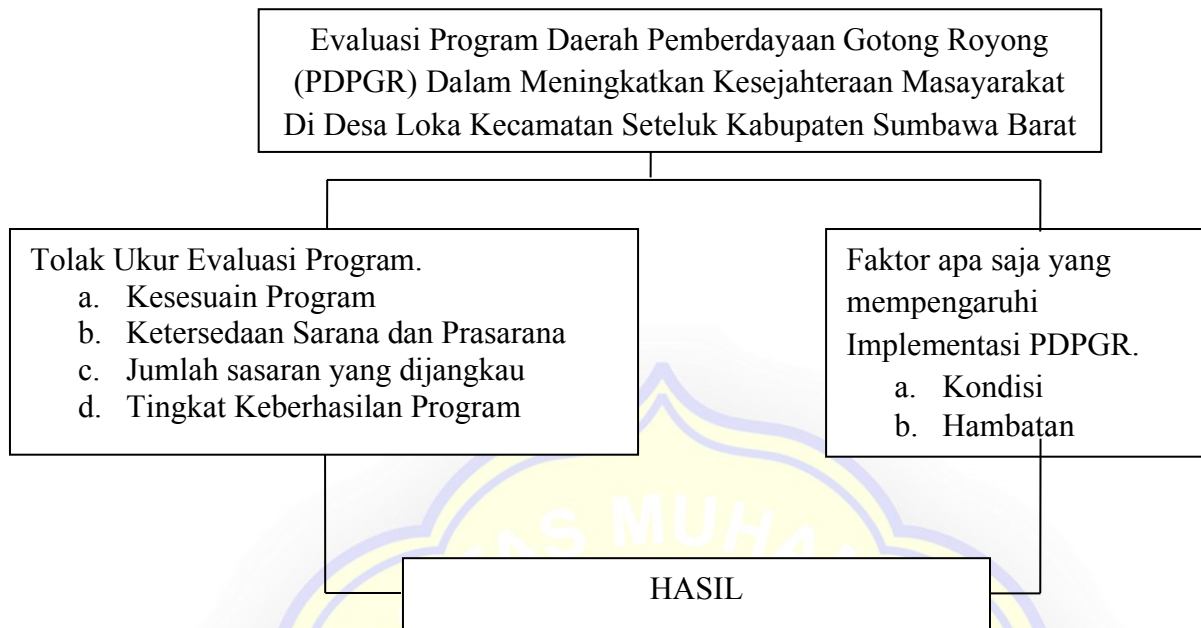
Dalam konteks nasional, kesejahteraan digunakan untuk menunjukkan bahwa negara memberikan pelayanan sosial yang komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai proyek sosialis demokratis yang lahir dari perjuangan kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Gagasan negara kesejahteraan di Barat dipandang sebagai perubahan dari aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis ke sistem kapitalis.

Sarjana Marxis, di sisi lain, mengatakan negara kesejahteraan hanyalah upaya untuk mengekang eksese terburuk kapitalisme. Mereka mengatakan negara kesejahteraan bukanlah negara sosialis. Di negara-negara kesejahteraan paling maju, sistem ekonomi masih dimiliki dan dikendalikan oleh kepentingan pribadi.

Kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan ide-ide kapitalis atau sosialis menawarkan definisi kesejahteraan mereka sendiri. Negara kesejahteraan didefinisikan sebagai sistem sosial yang unik berdasarkan prinsip-prinsip neo-merkantilisme. Negara kesejahteraan adalah konsensus kesejahteraan atau kompromi sosial-demokratis. Ini karena keselarasan historis antara kapitalisme dan sosialisme.

Dalam konteks teori kewarganegaraan, kesejahteraan diartikan sebagai kulminasi dari pengembangan kewarganegaraan. Masyarakat Barat yang demokratis berkembang dari minoritas yang menerima hak-hak sipil, politik dan sosial. Ketika hak-hak sipil menjadi lebih luas diterapkan, konsep kewarganegaraan menuntut pemenuhan penuh hak-hak sosial. Orang yang hidup dalam kemiskinan, tinggal di perumahan yang tidak layak, memiliki perawatan kesehatan yang buruk dan berpendidikan rendah tidak dianggap sebagai anggota masyarakat yang utuh dan setara.

2.7 Kerangka Berpikir



2.8 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa konsep adalah sebuah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasi hal khusus dan dapat di temukan dikamus (*dictionary definition*).

- a) Menurut Suharto yang dikutip dari Boyle (dalam Aspul Wadi, 2016:10) Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana strategi yang dapat dinilai dan dipelajari untuk menjadi acuan perbaikan dimasa mendatang
- b) Program adalah cara yang dipidahka untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan

- c) Menurut Edi Suharto dalam (Sabri, 2021:38) secara konseptual pemberdayaan atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).
- d) Menurut Koentjaraningrat (dalam Rochmadi, 2016:4) membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia; gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti

2.9 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek-aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti untuk mengetahui cara mengatur variable. Variable yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Evaluasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Desaloka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.

A. Tolak ukur dalam evaluasi suatu program yaitu :

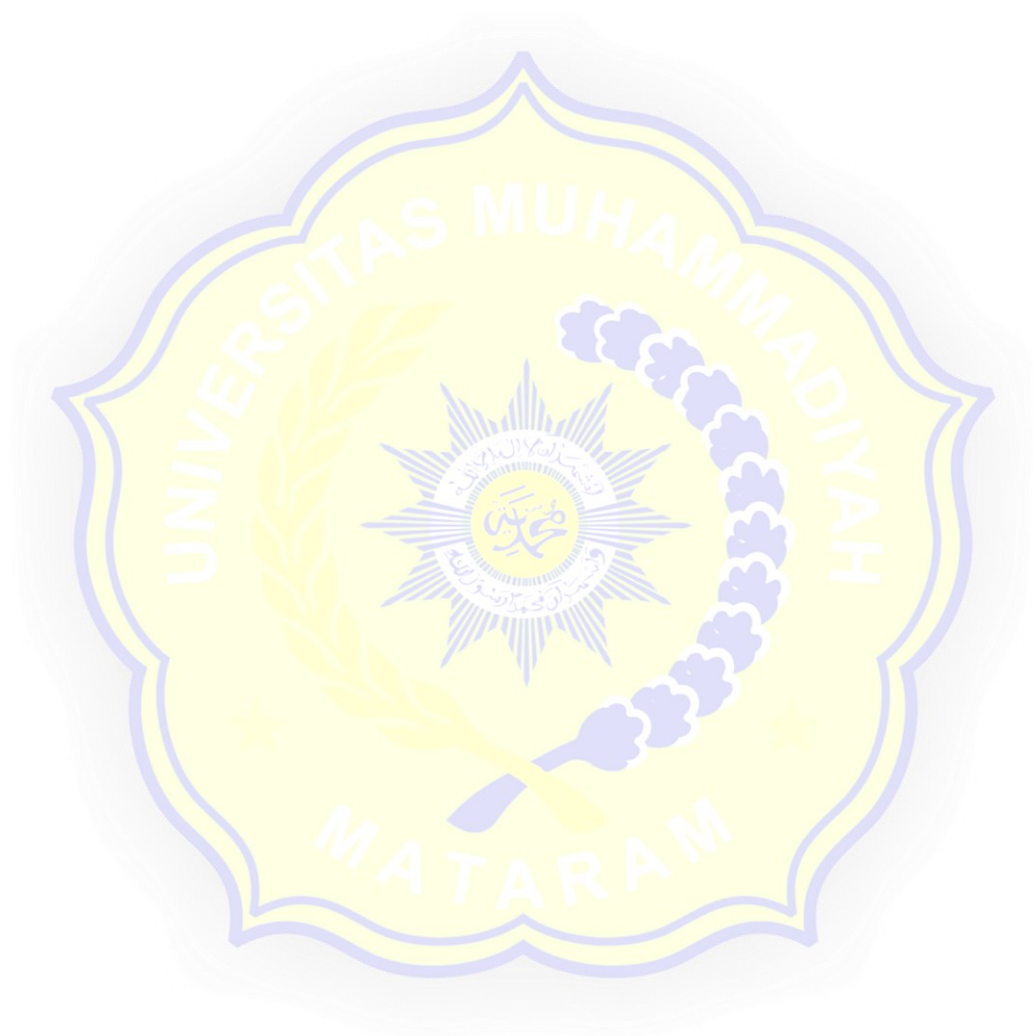
Adapun tolak ukur evaluasi pelaksanaan program menurut Swito (2022: 16) adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian Program
- b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
- c. Jumlah sasaran yang dijangkau
- d. Tingkat Keberhasilan Program

B. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan program.

Menurut **Edward (2003:32)** ia mengembangkan model didahului dengan dua permasalahan yang menjadi pertanyaan yaitu :

1. Kondisi – kondisi awal apakah yang diperlukan untuk
menyukseskan implementasi kebijakan.
2. Hambatan apakah yang ada didalam mengimplementasikan
kebijakan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata, lisan maupun tertulis, dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan. (Suyanto, 2005:166). Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Peran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Desaloka.

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desaloka Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun waktu dilaksanakannya penelitian ini adalah sejak keluarnya surat izin penelitian dari pihak kampus Universitas Muhammadiyah Mataram

3.3 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan Teknik *Snowball Sampling*. Selain itu menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam

penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek peneliti. Adapun subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua dan anggota Tim Penggerak Desa Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)
2. Kepala Desa
3. Masyarakat Desa Loka
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini Teknik yang dilakukan adalah:

3.4.1 Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2008:72). Menurut Hadari Nawawi (2005:100) bahwa observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga observasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dengan dasar teoritis yang mendalam kita lebih sadar akan asumsi-asumsi dan hipotesis untuk diuji kebenarannya berdasarkan observasi yang subjektif mungkin (Nasution, 2009:110).

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan (Sotori dan Komariah, 2009:47).

3.4.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (Ridwan, 2008:77).

3.5 Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran di penerima data tersebut, sehingga data harus diolah terlebih dahulu agar dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara ataupun symbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Menurut Ridwan (2008:69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variable penelitian atau peran PDPGR. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan

waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin melakukan wawancara dengan seluruh masyarakat. Maka peneliti mengambil strategi untuk mewawancarai:

5. Ketua dan anggota Tim Penggerak Desa Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)
6. Kepala Desa
7. Masyarakat setempat

3.5.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder. Data-data lain yang dibutuhkan sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan, seperti dokumentasi, Undang-Undang, arsip dan data-data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri atas: UU tentang Program Daerah pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), buku-buku atau jurnal tentang PDPGR, catatan penelitian lapangan, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karna dengan analisis, data tersebut dapat berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah penelitian (Sugiyono, 2018:129). Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data kualitatif Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
- b. Penyajian data Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai.

Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada

3.6.1 Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisadilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori diagram aliran (*flowchard*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.6.2 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak akan ada bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan yang mudah ditangkap maknanya.

